

**GLOBAL ENVIRONMENTAL REGIME :  
DI TENGAH PERDEBATAN PAHAM ANTROPOSENTRIS VERSUS EKOSENTRIS**

**Anna Yulia hartati**

*Staf Pengajar Prodi Hubungan Internasional, Fisip, Unwahas  
Email : anna\_uwh@yahoo.co.id*

**Abstract**

*This study describes the global environmental regime in the middle of the struggle between the anthropocentric and ecocentric paradigm. By reason of the fulfillment of human needs-paced dynamic and complex in modern industrial and developmental paradigm, the acts of injustice and arbitrary environmental and natural resource find justification argument. The exploitation of natural resources and the environment as an inevitable consequence of industrialism and developmental paradigms. Earth and environment has lost its existence and rights are essential in terms of ecology and ecosystems. Understand the debate between anthropocentric with ecocentric paradigm. How to manage the environment in order to be able to walk hand in hand with industrialization projects. What is the best solution to bridge both understand the need to apply the material and a deepening understanding of the importance of environmental sustainability continues. This study used a qualitative research method description. Secondary data obtained through the study of the documentary, through magazines, newspapers, books and other resources related to this research topic.*

**Key Word:** Environmental regime, anthropocentric, ecocentric.

**A. Pendahuluan**

Meskipun ada sedikit keraguan bahwa KTT lingkungan yang diselenggarakan oleh PBB benar-benar memberikan kontribusi bagi masing-masing perkembangan yang terjadi, bagaimanapun mereka telah berusaha membentuk agenda politik lingkungan global dengan tujuan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Penulis percaya bahwa KTT lingkungan yang diselenggarakan di bawah naungan PBB tersebut telah melayani beberapa fungsi penting, melalui pembentukan lembaga atau badan-badan khusus PBB hingga terbentuknya kebijakan-kebijakan

terkait pengembangan tata kelola lingkungan global.

Isu lingkungan hidup pertama kali diangkat sebagai agenda dalam hubungan internasional pada tahun 1970-an. Hal ini ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan hidup pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia. Dua dasawarsa kemudian isu lingkungan hidup diangkat kembali dalam konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Rio De Janeiro, Brazil tahun 1992, yang sebelumnya diawali dengan konferensi PBB mengenai perubahan iklim dunia di Montreal, Kanada tahun

1990.<sup>1</sup> Pertemuan berkala Konferensi PBB tentang lingkungan hidup dan pembangunan ini merupakan pertemuan tingkat global yang pertama dalam sejarah dunia.

Kepedulian terhadap lingkungan hidup menjadi isu global karena beberapa faktor, yaitu : *pertama*, permasalahan lingkungan hidup ini selalu mempunyai efek global. Misalnya, permasalahan yang menyangkut CFCs (*Chlorofluorocarbons*) yang berefek pada pemanasan global (*Global warming*) dan meningkatkan jenis dan kualitas penyakit akibat berlubangnya lapisan ozon yang dirasakan di seluruh dunia, *kedua*, isu lingkungan hidup juga menyangkut eksploitasi terhadap sumber daya global seperti lautan dan atmosfer, *ketiga*, permasalahan lingkungan hidup selalu bersifat transnasional, sehingga kerusakan lingkungan di suatu negara akan berdampak pula bagi wilayah di sekitarnya (misalnya kebakaran hutan di Kalimantan, menyebabkan penerbangan ke Singapura batal) dalam hal ini otonomi dan rasionalitas individu serta kedaulatan negara bisa menjadi tidak bermakna ketika ekosistem tersebut mengklaim kedaulatannya<sup>2</sup>, *keempat*, banyak kegiatan eksploitasi atau degradasi lingkungan memiliki skala lokal atau nasional, dan dilakukan di banyak tempat di seluruh dunia sehingga dapat dianggap sebagai masalah global, misalnya erosi dan degradasi tanah, penebangan hutan, polusi air dan sebagainya, *kelima*, proses yang menyebabkan terjadinya eksploitasi

<sup>1</sup> Richard W Mansbach, *Global Puzzle: Issues and actors in Global politics*, Houghton Mifflin Company, Boston, 1997, hal 14

<sup>2</sup> Purwo Santoso, *Pengelolaan Negara, Mekanisme Pasar dan Dinamika ekosistem : Tiga Medium interkasi pemerintahan*, dalam jurnal Transformasi Vol.1, no.1, September 2003, hal 58

yang berlebihan dan degradasi lingkungan berhubungan dengan proses-proses politik dan sosial-ekonomi yang lebih luas dimana proses-proses tersebut merupakan bagian dari ekonomi politik global.<sup>3</sup>

Kerusakan lingkungan hidup menjadi perhatian di lingkungan global, dimana aktor-aktor non negara memainkan peranan penting dalam merespon permasalahan lingkungan hidup internasional. Respon terhadap permasalahan lingkungan global berfokus pada perkembangan dan implementasi dari rezim lingkungan hidup internasional <sup>4</sup>. Secara khusus makna lingkungan hidup itu sendiri yaitu seluruh kondisi eksternal yang mempengaruhi kehidupan dan peranan organisme.

Kerjasama internasional dalam menangani isu lingkungan hidup global diarahkan untuk mencari kesepakatan ukuran-ukuran, patokan-patokan dan norma-norma internasional yang sah serta cara penerapannya. Pembuatan patokan, ukuran dan norma standar ini dibutuhkan untuk mendefinisikan prinsip umum penanganan kolektif dan membuat aturan serta proses yang tepat dalam pembentukan rezim internasional dalam dimensi lingkungan hidup. Proses implementasi rezim lingkungan hidup internasional nantinya akan merupakan suatu proses dimana anggota rezim harus mengumpulkan, menukar serta membahas informasi yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam rezim tersebut. Proses

<sup>3</sup> John Baylis, dan Steve Smith, *The Globalization of World politics :An Introduction to International Relations*, Oxford University Press, UK, 1999, hal 314-315

<sup>4</sup> Owen Greene, , "Environmental Regimes : Effectiveness and Implementation Review" dalam John Vogler dan Mark F Imber, *The Environment and International Relations*, Routledge, New York, 1996, hal. 202

implementasi rezim ini terdiri dari tahap pertukaran data dan informasi, analisis data, serta penilaian terhadap proses implementasi yang telah dilakukan oleh negara anggotanya.<sup>5</sup>

## B. Rumusan Masalah

Bagaimana posisi global environmental regime di tengah perdebatan Antroposentris versus ekosentris?

## C. Kerangka Teori

### a. Global environmental Regime

Kajian politik lingkungan global dimulai pada akhir 1960an hingga awal 1970an.<sup>6</sup> Saat ini kajian politik lingkungan hidup ini berada dibawah disiplin ilmu politik, dimana ia menganalisa tentang peran negara, lembaga-lembaga internasional, ekonomi politik global, kekuasaan global, norma dan ideologi, dan teori-teori hubungan internasional. Beberapa ahli melihat inti dari kajian politik lingkungan ini adalah pada kajian literatur atas negara dan tata kelola global. Beberapa ahli yang lain melihat bahwasanya politik lingkungan hidup ini melekat pada teori hubungan internasional dari rezim-rezim lingkungan. Ada juga yang beranggapan bahwa politik lingkungan hidup mempelajari dampak ekologi dari ekonomi global, seperti politik pertumbuhan, perdagangan, korporasi, finansial dan konsumsi. Meskipun banyak pendapat para ahli dan beragam riset yang menggunakan perspektif politik lingkungan hidup, Dauvergne menegaskan bahwa sumbangan dan kontribusi utama dari kajian politik lingkungan hidup ini adalah meluasnya

area riset interdisipliner dalam politik dan lingkungan ini.

## b. Antroposentris Versus Ekosentris

Penulis mencoba membandingkan pendapat kedua kubu tersebut dalam tabel 1, sebagaimana terlampir.

## D. Metode Penelitian

### a. Metode dan Cara Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Lexy Moleong, 1989). Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>7</sup>

Dalam metode ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan tentang posisi global environmental Regime ditengah perdebatan antara paham Antroposentrisme dengan Ekosentrisme. Dengan data – data yang tersedia peneliti menganalisa tentang keadaan yang terjadi.

### b. Teknik Pengambilan Data

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian dokumen . Penelitian

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Dalam *Handbook of Global Environmental Politics* (Edited by Peter Dauvergne, 2005, hal 8

<sup>7</sup> Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal.63

dokumen dimaksudkan untuk mendeskripsikan berbagai realita yang diteliti. Data diperoleh melalui sumber data sekunder. Data-data sekunder diperoleh melalui studi dokumenter, yakni melalui majalah, surat kabar, buku-buku dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

Peneliti mengumpulkan data dari perpustakaan Fisip Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Juga dari beberapa perpustakaan yang terdapat data yang relevan dengan penelitian ini.

### c. Teknik Analisa Data

Analisa data dilakukan melalui interpretasi dari dokumentasi yang terkumpul, kemudian dianalisis secara deskriptif – kualitatif. Dengan mengadakan survei terhadap data yang telah ada peneliti menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkepentingan. Untuk mengetahui validitas data informasi yang diperoleh diadakan *Cross cheking* data tersebut menunjukkan adanya *reliable* data yang akan dianalisa.

## E. Pembahasan

### a. Degradasi Lingkungan Hidup

Ketika manusia modern meletakkan parameter pertumbuhan ekonomi dalam paradigma developmentalisme untuk mengukur standar kualitas hidup dan kelayakan hidup, sejak itulah sebetulnya lingkungan hidup dan kondisi sosial budaya masyarakat telah dikorbankan dan mengalami degradasi yang sangat hebat. Pada sisi lingkungan hidup dan sumber daya alam degradasi itu telah menghadirkan krisis lingkungan hidup yang berkepanjangan dan penurunan kualitas lingkungan hidup yang tajam dari waktu ke waktu. Ini adalah bayaran yang paling mahal dari kehidupan

modernitas industrial yang dianut oleh hampir seluruh umat manusia di dunia pada saat ini. Degradasi lingkungan hidup dapat dikatakan membuat sejenis “ancaman” khusus yang bukan ancaman bagi negara tetapi pada masyarakat secara keseluruhan. Degradasi lingkungan merupakan ancaman terhadap lingkungan global, yaitu samudera, laut, lapisan ozon, dan sistem iklim yang merupakan sistem pendukung kehidupan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Populasi global yang sangat cepat meningkat mengejar standar kehidupan yang lebih tinggi merupakan ancaman potensial bagi lingkungan hidup. Produksi makanan adalah contohnya. Suplai makanan dunia tumbuh lebih cepat dibanding populasi global. Tetapi suplai itu didistribusikan dengan tidak seimbang, terdapat surplus makanan yang besar sekali di negara-negara maju dan kekurangan yang besar di kebanyakan negara-negara miskin. Di mana makanan sulit diperoleh, masyarakat akan sering mengeksploitasi tanah secara berlebihan agar dapat “sesuatu” dari dalamnya.

Produksi massal industri mengancam menghabiskan sumber daya material dan energi yang langka. Masalah lokal tentang degradasi lingkungan hidup semakin memiliki implikasi internasional. Polusi udara tidak akan berhenti diperbatasan, hujan asam dari Perancis, misalnya mengancam masyarakat, persediaan air tanah, ikan di danau dan hutan-hutan tidak hanya di Perancis tetapi juga di negara-negara tetangga Eropa. Produksi gas CFC yang digunakan untuk mesin pendingin, penyejuk ruangan, bahan kimia dan produk industri lainnya, merupakan ancaman besar bagi lapisan ozon, selimut gas yang melindungi bumi dari sinar ultra violet matahari.

CFC berinteraksi dengan secara kimiawi dengan lapisan ozon sehingga menipiskannya. Karbondioksida dan kandungan kimia lainnya terkunci dalam panas dekat pada permukaan bumi dan oleh karena itu menghasilkan pemanasan global, yang disebut efek rumah kaca. Pemanasan global berarti polusi udara yang sangat dan meningkatnya permukaan air laut, suatu ancaman bagi sebagian penduduk dunia yang hidup di wilayah pantai.

#### **b. Modernis (Antroposentris) Vs Ekoradikal (Ekosentris)**

Interaksi politik dan ekonomi yang sedang berlangsung saat ini pada dasarnya mengacu pada paham antroposentris. Disatu sisi ada paham ekosentris yang menjadi sumber inspirasi bagi gerakan lingkungan hidup. Dinamika dalam merespon persoalan lingkungan hidup berlangsung diantara kedua pemikiran tersebut.

Kaum modernis (antroposentris) yakin bahwa perbaikan terus menerus dalam pengetahuan ilmiah dan dalam persaingan teknologi kita akan meningkatkan keahlian kita dalam menguasai lingkungan. Dengan kata lain, kita akan terus meningkatkan keahlian kita dalam menghasilkan dan mengkonsumsi dengan cara yang ramah lingkungan. Sebagai contoh, emisi gas CFC dikurangi, produksi industri membutuhkan sedikit input bahan mentah yang langka dari sebelumnya.

Sebaliknya kaum ekoradikal (ekosentris) berpikir bahwa ekosistem memiliki daya tampung yang terbatas. Keterbatasan tersebut "didefinisikan sebagai seberapa besar suatu populasi spesies dapat tumbuh sebelum spesies tersebut berlebihan menggunakan sumber daya yang tersedia di

ekosistem"<sup>8</sup>. Kaum ekoradikal menyatakan bahwa masyarakat manusia di muka bumi terancam bergerak mendekati daya tampung planet, tidak akan ada perbaikan teknologi yang sederhana yang dapat mengurus masalah tersebut. Solusinya adalah pengendalian populasi yang lebih keras dan perubahan drastis dalam gaya hidup modern menuju cara hidup yang ramah lingkungan, berorientasi sedikit mengkonsumsi dan sedikit menghasilkan sampah.<sup>9</sup>

Pada awalnya paham antroposentris yang diwakili oleh kaum modernis adalah pemahaman bahwa manusia di atas alam. Intinya bahwa manusia diijinkan mengeksploitasi alam dalam mengejar nasib dan perkembangan manusia. Sebaliknya paham ekosentris yang diwakili oleh kaum ekoradikal, menempatkan nilai yang sama pada manusia dan alam sebagai bagian dari satu biosistem tunggal. Dari pandangan ini manusia tidak memiliki hak mengeksploitasi alam bagi keuntungannya sendiri. Manusia memiliki kewajiban untuk hidup dalam keharmonisan dengan alam dan menghargai serta memelihara keseimbangan ekologis secara menyeluruh<sup>10</sup>. Kaum ekoradikal menyerukan perubahan mendalam bukan hanya dalam organisasi ekonomi tetapi juga dalam organisasi politik. Mereka berpendapat bahwa negara lebih merupakan masalah daripada sebagai sebuah solusi bagi masalah lingkungan hidup. Negara adalah bagian dari masyarakat modern dan masyarakat modern adalah sebab dari krisis lingkungan hidup. Tetapi tidak

<sup>8</sup> Hughes, B.B, *Continuity and Change in World Politics :The Clash of Perspective*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1991, hal.410

<sup>9</sup> *Ibid*, hal.409

<sup>10</sup> *Ibid*

ada kesepakatan antara kaum ekoradikal tentang peran atau apa yang menggantikan negara. Disatu pihak ada, ada pengakuan perlunya sentralisasi pengendalian politik global agar dapat mengamankan manajemen ekosistem global keseluruhan. Disisi lain, ada pengakuan bahwa komunitas lokal yang kecil, mandiri, adalah yang paling tepat untuk memajukan gaya hidup tidak konsumtif dalam keseimbangan ekologis dengan kondisi lokal tertentu. Perdebatan ini masih terus bergulir yang menentukan adalah banyak sedikitnya orang yang memposisikan pada paham mana dalam menyikapi isu lingkungan hidup.

### c. Rezim Internasional Lingkungan Hidup Versus Rezim Perdagangan

Masalah lingkungan hidup bisa memberikan tekanan pada negara untuk terlibat dalam kerjasama internasional yang lebih besar. Rezim internasional telah dibentuk dalam sejumlah bidang tertentu untuk menyatakan berbagai macam isu lingkungan hidup, meliputi hujan asam, penipisan lapisan ozon, pemburuan ikan paus, perdagangan limbah beracun, lingkungan hidup benua antartika, pemanasan global dan punahnya keanekaragaman hayati.

Punahnya keanekaragaman hayati ini akibat proses globalisasi yang telah menyebarkan teknologi pertanian yang tidak ramah lingkungan ke sebagian besar negara Selatan. Di tingkat internasional baru sedikit sekali upaya yang dilakukan bagi implementasi pertanian berkelanjutan. Ketiadaan komitmen ini boleh jadi terkait dengan kenyataan bahwa model-model pertanian berbasis kimia yang saat ini sangat dominan menjadi dasar pijakan bagi perusahaan-perusahaan agribisnis komersial untuk memupuk

penghasilan mereka, sementara pola-pola pertanian organik dan ramah lingkungan yang lebih bersandar pada asupan rendah dianggap tidak menarik bagi perdagangan. Pada masa lalu, sebagian besar bantuan pertanian dipergunakan untuk model pertanian Revolusi Hijau, yang menggunakan bibit-bibit dengan respon yang tinggi pada pupuk non organik dan pestisida kimia berdosisi tinggi. Varietas bibit yang sangat terbatas tersebut telah menggeser varietas bibit-bibit tradisional yang sangat beragam, sehingga mengikis keanekaragaman hayati. Persoalan ekologi lainnya yang adalah menurunnya kesuburan tanah, polusi tanah dan sumber-sumber air oleh bahan-bahan kimia, keracunan pestisida dan gangguan hama yang disebabkan oleh meningkatnya imunitas hama atas pestisida. Hal tersebut merupakan tanda-tanda sistem teknologi mengalami kemunduran dan keuntungan utama diklaim oleh sistem tersebut seperti produktivitas tinggi, yang dengan sendirinya sampai saat ini masih dipertanyakan. Dengan munculnya berbagai hal yang mengecewakan dalam revolusi hijau, sumberdaya komersial mulai berpaling pada bioteknologi baru. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan tingkat kehati-hatian yang tinggi, karena klaim mengenai keuntungan rekayasa genetika sampai saat ini sama sekali belum terbukti, sementara di sisi lain terdapat bukti yang semakin banyak mengenai bahaya-bahaya yang dapat dan telah terjadi.<sup>11</sup>

Dengan adanya keprihatinan atas masalah keanekaragaman hayati, maka seharusnya berbagai sumber

<sup>11</sup> Khor, Martin, *Globalisasi dan Krisis Pembangunan Berkelanjutan*, Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2005, hal 74

bantuan tidak disalurkan untuk pengembangan bioteknologi sebagai suatu teknologi baru yang dianggap mampu menuntaskan berbagai masalah. Sebaiknya prioritas lebih diberikan bagi upaya-upaya mendorong penelitian dan proyek-proyek pengembangan sistem dan praktek lingkungan maupun pertanian yang berbasis masyarakat. Sejauh ini bantuan yang diberikan relatif kecil. Alasannya sekalipun "Pertanian berkelanjutan" mungkin baik secara ekologis, namun produktivitasnya dianggap kurang mencukupi. Alasan ini hanya praduga yang tidak terbukti sebagaimana dituduhkan ketika metode Revolusi Hijau diterapkan, karena terdapat bukti bahwa sebenarnya pertanian ekologis pun mampu menghasilkan tingkat panen yang tinggi.

Sejak berdirinya UNCED (*United Nation Conference on Environment and Development*), hanya terdapat sejumlah kecil gerakan resmi yang terkoordinasi pada tingkatan global untuk menghapuskan pertanian yang mengandalkan asupan-asupan kimia maupun untuk mengembangkan pertanian berkelanjutan, kendati terjadi peningkatan permintaan yang sangat besar dari masyarakat atas produk pangan organik. Sebagai akibat kurangnya dukungan, pertanian berkelanjutan saat ini tetap hanya semacam anekdot. Satu perkembangan positif saat ini adalah perubahan kebijakan di sejumlah negara Eropa terutama Jerman, yang lebih mengarah pada pengembangan pertanian organik. Hal ini dilatarbelakangi oleh akibat yang timbul dari rentetan persoalan yang terkait dengan pertanian konvensional, pertanian dan pengembangan ternak dengan biotek, yang diantaranya meliputi : Persoalan BSE (energi ramah lingkungan),

penyakit kaki dan mulut dan tidak populernya pertanian bioteknologi dalam masyarakat. Sungguh ironi memang, dimana negara-negara dibelahan bumi selatan yang diklaim memiliki lahan yang subur harus merasakan kekecewaan yang besar akibat dari kebijakan yang tidak berpihak pada lingkungan. Ini menunjukkan bahwa gerakan ekosentris tergilas oleh paham teknosentris. Mau tidak mau negara-negara pertanian menurut saja dan mengikuti aturan main yang sudah ditetapkan.

Berbeda dengan rezim ozon, dimana rezim ini merupakan salah satu rezim yang sangat berhasil dari kerjasama internasional pada lingkungan hidup. Rezim ozon memuat persetujuan internasional untuk memotong dan pada akhirnya menghentikan produksi CFC dan dengan demikian bermaksud menghentikan kerusakan lapisan ozon yang telah terjadi dalam dekade belakangan ini. Beberapa rezim lainnya kurang berhasil disebabkan karena kurang komitmen yang memadai dan kerjasama yang nyata dari negara-negara yang berpartisipasi<sup>12</sup>.

Kondisi semakin parah ketika paradigma globalisasi semakin keras gaungnya. KTT bumi yang dilaksanakan pada saat globalisasi dimana liberalisasi ekonomi juga semakin pesat perkembangannya. Hal ini nampak ketika jargon pembangunan berkelanjutan yang digagas di Rio hingga ke Johannesburg harus bersaing kuat dengan paradigma globalisasi, *summit to summit* pun hanya terkesan sebagai *symbolic statement* yang kental dengan nuansa politis, disamping operasionalisasinya tetap dimatangkan

---

<sup>12</sup> P.M Haas, et.al, (eds), *Institutions for The Earth*, MIT Press, Cambridge, 1993, hal. 34

di badan-badan khusus berdasarkan permasalahannya juga nampak dominasi negara-negara maju terkesan memaksakan kehendak untuk kepentingannya dan "menodai" pembangunan berkelanjutan. Memang pada kenyataannya ada beberapa kelemahan dari prinsip-prinsip dalam KTT Bumi tersebut yaitu rumusnya sangat didominasi oleh rasionalitas manusia dan seolah-olah manusia dapat mengerjakan apa saja untuk mengatasi alam semesta. Perjalanan dari konferensi ke konferensi, nampak masing-masing kelompok kepentingan ingin memasukkan aspirasi dalam deklarasi tersebut.

Apa artinya persaingan pembangunan berkelanjutan versus globalisasi ekonomi ini bagi lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kenyataannya gap Utara Selatan semakin lebar sementara semangat Rio tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk diterjemahkan dalam tindakan nyata. Hanya lima negara utara yang memenuhi target 0,7 % dari GNP sebagai bantuan melaksanakan agenda 21, alih teknologi tidak pernah terjadi<sup>13</sup>. Komitmen memperbaiki lingkungan tidak pernah dilaksanakan. Bahkan Amerika Serikat (AS) menolak kesepakatan Protokol Kyoto sebagai pelaksanaan bagi konvensi perubahan iklim, karena memuat target waktu dan penurunan emisi gas rumah kaca. Disinyalir kaum elit Jepang dan Eropa pura-pura kecewa dengan keputusan AS, tetapi kekecewaan mereka yang sebenarnya adalah AS secara gamblang menjabarkan dinamika dasar dari sistem produksi yang mereka anut bersama, yaitu perluasan terus-menerus dilakukan melalui percepatan konsumsi

dan peracunan alam<sup>14</sup>. Lain halnya AS dengan PBB tentang keragaman hayati, AS tidak mau menandatangani konvensi tersebut karena diperkirakan efek konvensi tersebut mengandung resiko besar pada perkembangan ekonomi AS yang bersandar pada industri bioteknologi<sup>15</sup>

Sementara itu PBB, organisasi yang di beri mandat mengatur pelaksanaan pembangunan berkelanjutan melalui *Commission on Sustainable development (CSD)* yang dibentuk di KTT Bumi, mengalami proses pelemahan karena negara utara menolak membayar penuh iuran mereka.<sup>16</sup> PBB tidak mendapatkan dukungan politik dari negara maju. Sebaliknya institusi keuangan seperti IMF dan Bank Dunia, atau institusi perdagangan WTO semakin dipentingkan oleh negara maju sebagai organisasi yang dapat mengatur pembangunan internasional. PBB semakin mengalami krisis legitimasi, dan negara maju selalu memiliki posisi tawar yang kuat dan negara berkembang akan tetap berada pada lingkaran setan. Negara-negara utara mengumumkan bahwa ia semakin meningkatkan kesadaran lingkungannya. Segala komoditas perdagangan ditetapkan persyaratan ketat terhadap residu kimia yang terkandung pada produk makanan dari Selatan. Persyaratan pengelolaan lingkungan ditetapkan dan *ecolabel* ditetapkan untuk menyatakan bahwa komoditas diproses secara ramah

---

<sup>13</sup> Kompas, Senin 27 Mei 2002

---

<sup>14</sup>  
<http://www.focusweb.org/publications/Johannesburg.htm>, diakses 02 Juli 2012.

<sup>15</sup> Kompas, Op.Cit

<sup>16</sup> Hira Jhamtani, *Jalan Panjang Rio 1992 menuju Johannesburg 2002*, Wacana, Insist, Edisi XII, 2002

lingkungan sehingga menjadi *environmental friendly product*.<sup>17</sup>

Sejumlah negara-negara selatan mulai kewalahan karena pada umumnya tidak menguasai inovasi teknologi dan manajemen lingkungan. Dibelakang isu lingkungan sebenarnya negara-negara utara telah menyiapkan inovasi teknologi dan manajemen lingkungan. Ini berarti negara-negara Selatan harus membeli teknologi dan sistem dari Utara untuk memenuhi persyaratan teknis agar komoditasnya dapat masuk dalam perdagangan dunia. Para pelaku ekonomi Selatan mau tidak mau harus menyisihkan modalnya untuk diinvestasikan dalam pproses pengolahan sumberdaya yang berwawasan lingkungan.

Rezim perdagangan dalam hal ini diwakili oleh WTO (*World Trade Organization*), semakin memantapkan langkahnya. Dengan mendapatkan dukungan penuh dari negara-negara Utara, WTO sebagai institusi resmi perdagangan dunia menjadi ajang bagi negara-negara utara untuk menanamkan pengaruhnya. Erat kaitannya dengan upaya atau kemampuan menyelesaikan isu-isu lingkungan, sosial dan pembangunan, dalam beberapa tahun belakangan ini juga ditandai dengan melemahnya kepemimpinan politik di hampir seluruh negara di dunia. Di negara-negara utara, kepemimpinan politik telah larut dalam alur pemikiran mengenai kebutuhan mempertahankan daya saing dalam dunia yang kian menyatu sehingga akhirnya menempatkan masalah kepedulian terhadap lingkungan dan sosial pada prioritas yang rendah dalam daftar

mereka. Ketimbang memberi prioritas penting pada permasalahan lingkungan dan sosial, pemerintah negara-negara utara justru memenuhi keinginan perusahaan-perusahaan mereka untuk lebih mendukung liberalisasi dan mendahulukan kepentingan-kepentingan mereka baik dalam tingkatan domestik maupun internasional. Dengan demikian dalam setiap negosiasi internasional, entah dalam WTO atau PBB, pemerintah negara-negara utara selalu mengajukan usulan-usulan yang bisa memperluas hak-hak TNCs (*Transnational Corporations*), sambil menghalangi atau melemahkan prinsip-prinsip dan pemikiran-pemikiran yang dibuat dengan mengatasnamakan pembangunan.

Di arena internasional, pemerintah negara-negara Selatan, baik secara individual maupun sebagai kelompok, secara umum tidak cukup siap untuk melakukan negosiasi-negosiasi, dibandingkan dengan pemerintah negara-negara Utara. Meskipun terjadi peningkatan yang dramatis atas arti penting berbagai organisasi internasional dan proses-proses dalam penentuan kebijakan nasional, kepemimpinan dan birokrasi politik NSB (Negara sedang Berkembang) tidak menempatkan orang yang cukup memadai dan tidak memiliki sumberdaya keuangan yang cukup untuk persiapan-persiapan menghadapi berbagai negosiasi internasional. Akhirnya mereka hanya berada pada posisi yang lemah dalam suatu negosiasi, mereka tidak mampu mengungkapkan pendapat secara efektif dan kadang-kadang terpaksa menyetujui pendapat negara Utara walaupun merugikan dirinya.

<sup>17</sup> Baiquni, M dan Susilawardani, *Pembangunan yang tidak Berkelanjutan Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia*, Transmedia Global Wacana, Yogyakarta, 2002, hal 187

Kondisi hubungan internasional yang terformat dalam *Common Life World (CLW)* hadir dalam wilayah regional, geografi dan isu melalui mekanisme institusionalisasi tingkat tinggi, misalnya regional Uni Eropa, AFTA atau wilayah isu misalnya perdagangan atau lingkungan. Upaya menghidupkan terus-menerus CLW muncul jika ada beberapa aktor (negara) yang terus menerus membicarakan suatu isu tertentu, dalam hubungan internasional dikenal adanya "*norm entrepreneur*" mekanisme yang terus menerus menyuarkan suatu isu tertentu hingga akhirnya menjadi norma yang ditaati oleh negara-negara. Pemunculan norma berasal dari orang (individu, negara, LSM) yang kemudian masuk menjadi perdebatan negara yang kemudian diperjuangkan. Kalau norma itu sudah diterima, maka akan ada penerapan norma-norma itu diseluruh negara.

Hal ini cukup terbukti, ketika negara-negara maju mencari solusi bagaimana pertumbuhan ekonomi menciptakan permintaan dan pasar, dengan menghasilkan inovasi teknologi alternatif yang lebih irit bahan dan modal, dan secara struktural mengubah pola ekonomi industrialis di bumi ini. Dalam *World Development Report 1992* terlihat jelas bahwa Bank Dunia sangat mengandalkan pola tersebut sebagai paradigma pertumbuhan ekonomi modern. Dan memang untuk beberapa dekade, kisah ini tampak menjadi model solusi yang saling menguntungkan bagi masalah ekologi dan ekonomi yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menaikkan kesejahteraan umat manusia, dan benar-benar mengurangi resiko lingkungan.<sup>18</sup>

Hal ini harus senantiasa diimplementasikan oleh para ahli ekonomi dan ahli lingkungan pada umumnya bahwa salah satu kunci menuju perdagangan yang berkelanjutan menurut lingkungan hidup adalah mengusahakan agar produksi mencerminkan biaya lingkungan hidup sepenuhnya. Kalau biaya-biaya ini diperhitungkan oleh seluruh negara, maka perdagangan merupakan sarana yang efisien untuk membagikan sumber daya ke seluruh dunia.

Salah satu upaya untuk menjembatani gap ini adalah cara utama untuk mencapai pencantuman biaya ini ialah melalui pajak lingkungan hidup. Pajak pada energi misalnya akan menolong membatasi biaya-biaya perdagangan lingkungan hidup dengan cara mendorong penggunaan transportasi yang paling hemat energi atau pajak pada kayu dari hutan primer akan mendorong penggunaan kayu yang dibudidayakan, dengan demikian mengurangi pengaruh perdagangan kayu gelondongan yang "rakus" pada penggundulan hutan. Akan tetapi sejak awal negara industri biasanya lebih berhasil daripada negara berkembang dalam menentukan harga produk ekspor mereka yang mencerminkan perhitungan biaya kerusakan lingkungan dan pengendalian kerusakan tersebut. Misalnya kasus ekspor dari negara industri, biaya-biaya dibayar oleh konsumen di negara pengimpor, termasuk di negara berkembang. Akan tetapi biaya ekspor negara berkembang tetap di bayar dalam negeri, sebagian besar dalam bentuk biaya kesehatan, harta milik dan ekosistem.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> UNDP, *Human Development Report 1992*, Oxford University Press, New York, 1992, hal 13

---

<sup>19</sup> Laporan Komisi Dunia Untuk Lingkungan dan Pembangunan, *Hari Depan Kita Bersama*, PT Gramedia, Jakarta, 1988, hal 114

Jalan lain menuju perdagangan lebih hijau sebenarnya adalah penetapan standar/pencantuman label lingkungan seperti program *Malaikat Biru* di Jerman atau *cap hijau* di AS, kenyataannya negara-negara lebih memilih tingkat perlindungan yang sangat berbeda dan berbeda pula dalam penegakannya. Adanya kekhawatiran kerugian akan lebih besar pada pihak produsen karena terpaksa memenuhi peraturan yang lebih ketat dari para pesaingnya. Misalnya rencana masyarakat Eropa untuk mengenakan pajak karbon sedang dihambat oleh ketakutan akan kerugian yang kompetitif jika Jepang dan AS tidak melakukan tindakan yang serupa.<sup>20</sup>

Fenomena *Green Consumerism* serta kebutuhan akan *cleaner production*, menghadirkan kompetisi para produsen dalam menarik simpati dari konsumen dengan jargon "moralitas" dengan kata lain tetap berpostur kapitalis tapi bagaimana tetap menggiring dalam nuansa "hijau". Namun perdagangan akan terus merupakan salah satu masalah lingkungan hidup yang masih saja dipersoalkan, sementara itu persetujuan-persetujuan regional semakin banyak dan akan menjadi alat yang semakin perkasa menggariskan kebijakan-kebijakannya baik dalam maupun antar negara-negara. Dalam klausul "perdagangan dan globalisasi", lobi NGO yang berhasil mematahkan dominasi WTO mengenai masalah perdagangan, lingkungan dan pembangunan dalam suatu perundingan, dinilai sebagai suatu kemenangan. Namun lagi-lagi pemerintah-pemerintah gagal untuk menegakkan otoritas serta otonomi dari

*Multilateral Environment Agreement*. Sebagian besar malah menyetujui dilanjutkannya hubungan antara *Multilateral Environment Agreement* dan WTO, sehingga kekhawatiran yang muncul WTO akan berperan besar.

Pada intinya yang dibutuhkan oleh negara berkembang adalah peluang untuk bisa mendapat penghasilan. Memang negara berkembang biasanya kaya sumber daya alam : hasil tambang, hutan dan sejenisnya, namun mengekspor sumber daya alam tanpa diproses, keuntungannya akan sangat kecil. Karena itu negara berkembang harus mendapat kesempatan untuk mengembangkan teknologi untuk menaikkan nilai tambah. Tanpa itu, negara berkembang harus terus mendapat subsidi dari negara maju.

Sedangkan negara maju harus bisa meningkatkan keluaran dengan mengurangi masukan, meminimumkan penggunaan energi, mengurangi limbah dan mengurangi penggunaan ruang. Misalnya dengan menciptakan mesin mobil yang efisien dan irit menggunakan bensin, mengurangi penggunaan energi, dan mengurangi limbah.

Namun kenyataannya titik-titik kompromi juga masih didominasi oleh kalangan konvensional. Hal ini dikarenakan "image" perdagangan (Bretton Woods) dan Lingkungan (Stockholm) yang awalnya selalu disetir dan bermuara di negara-negara maju. Dari semua kemelut ini, satu yang tetap dan harus selalu ada adalah wacana ekologis harus terus menerus dikonstruksikan paling tidak meminimalisir kerusakan lingkungan yang merupakan "titipan anak cucu kita".

## F. Kesimpulan

<sup>20</sup> Brown, Lester R, Dkk, *Masa Depan Bumi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993, hal.469

Dengan sedikit optimis tulisan ini mencoba untuk memperkecil *gap* yang ada, karena pada hakekatnya persaingan antara paham antroposentris dan ekosentris masih akan terus berlanjut. Berbagai gerakan yang pro lingkungan yang diwakili oleh rezim lingkungan hidup semakin lama mengalami metamorfosis dan akhirnya menemukan corak baru yang lebih ekonomistik. Rezim perdagangan yang membungkus jargonnya dalam perdagangan yang lebih hijau, telah memenangkan kompetisi di arena internasional. Mau tidak mau negara – negara berkembang mengikuti “*game*” yang di buat oleh rezim tersebut.

Munculnya tata kelola lingkungan global, di mana PBB mengambil bagian penting di dalamnya, menjadi subyek perdebatan yang cukup besar. Singkatnya, KTT lingkungan PBB dapat diartikan dalam dua cara yang saling bertentangan. Pertama, mereka dapat dilihat sebagai tindakan diplomasi global, dalam hal ini mereka telah melayani beberapa fungsi penting. Atau dari sikap lingkungan yang radikal, mereka dapat dinilai sebagai cara di mana kapitalisme bisa lepas dari krisis lingkungan melalui pengelolaan teknis dari lingkungan dan penggunaan pasar. Sementara struktur pemerintahan telah dibuka oleh keterlibatan PBB dengan pembangunan berkelanjutan, khususnya di tingkat internasional, struktur ini terus beroperasi dalam proses tata kelola. Diferensial kekuasaan politik dan ekonomi dalam hal ini, baik pada tingkat internasional atau tingkat lokal, membatasi kemampuan aktor untuk terlibat secara efektif dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

Hanya kesadaran dari negara maju sangat diharapkan untuk mengurangi emisi, mengembangkan

teknologi bersih bagi diri mereka sendiri maupun bagi negara berkembang, serta menurunkan pola-pola dan tingkat permintaan mereka (konsumerisme) yang cenderung merusak lingkungan. Dalam hal ini setidaknya negara berkembang memiliki sedikit *bargaining position* : Tanpa kerjasama mereka, maka tidak akan ada disana “tawar menawar global’ untuk mengurangi emisi karbondioksida atau perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan hutan-hutan dunia. Harga dari kerjasama itu adalah berupa uang yang jumlahnya sangat banyak, yang tidak banyak bagi lingkungan, tetapi juga bagi pembangunan, yaitu pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan demikian kemiskinan dapat diatasi dengan mengubah cara mencapai pertumbuhan ekonomi. Cara meningkatkan pendapatan tidak boleh lagi hanya lewat jalur ekonomi, tetapi lewat jalur sosial dan lingkungan. Artinya faktor biaya lingkungan dan sosial harus masuk ke biaya produksi, karena selama ini biaya lingkungan dan sosial dipikul oleh rakyat. Inilah bentuk baru ekonomi pembangunan yang di sebut sebagai ekonomi berkelanjutan. Dengan mengacu pada hal tersebut diatas diharapkan bahwa gerakan lingkungan menjadi “enteng” dalam memasukkan nilai-nilai environmentalisme untuk menggantikan nilai-nilai dasar yang menjadi penyebab kerusakan lingkungan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Baiquni, M dan Susilawardani,  
*Pembangunan yang tidak Berkelanjutan Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia*,  
Transmedia Global Wacana,  
Yogyakarta, 2002

- Baylis, John dan Steve Smith, *The Globalization of World politics :An Introduction to International Relations*, Oxford University Press, UK, 1999
- Brown, Lester R, Dkk, *Masa Depan Bumi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993
- Eckersley, Robyn, *Environmentalism and Political Theory ; Towards an Ecosentric Approach*, UCL Press, London, 1992
- Goodin, R, *Green Political Theory*, Polity Press, Cambridge, 1992
- Greene, Owen, "Environmental Regimes : Effectiveness and Implementation Review" dalam John Vogler dan Mark F Imber, *The Environment and International Relations*, Routledge, New York, 1996
- Haas, P.M. et.al, (eds), *Institutions for The Earth*, MIT Press, Cambridge, 1993
- Hughes, B.B, *Continuity and Change in World Politics :The Clash of Perspective*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1991
- Jhamtani, Hira, *Jalan Panjang Rio 1992 menuju Johannesburg 2002*, Wacana, Insist, Edisi XII, 2002
- Khor, Martin, *Globalisasi dan Krisis Pembangunan Berkelanjutan*, Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2005
- Laporan Komisi Dunia Untuk Lingkungan dan Pembangunan, *Hari Depan Kita Bersama*, PT Gramedia, Jakarta, 1988
- Mansbach, Richard W, *Global Puzzle: Issues and actors in Global politics*, Houghton Mifflin Company, Boston, 1997
- Myers, N, and Simon, J.L, *Scarcity or Abundance? A debate on Environmen*, Norton, New York, 1994
- Purwo Santoso, *Pengelolaan Negara, Mekanisme Pasar dan Dinamika ekosistem : Tiga Medium interkasi pemerintahan*, dalam jurnal Transformasi Vol.1, no.1, September 2003
- UNDP, *Human Development Report 1992*, Oxford University Press, New York, 1992
- Kompas, Senin 27 Mei 2002
- <http://www.focusweb.org/publiccations/Johannesburg.htm>,

**Lampiran**

Table Perbandingan Perspektif

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Kaum modernis :</b><br/>Lingkungan hidup bukan masalah serius. Kemajuan dalam pengetahuan dan teknologi akan memungkinkan kita melindungi lingkungan hidup.</p>  | <p><b>Kaum Ekoradikal :</b><br/>Lingkungan hidup merupakan masalah serius. Perubahan drastis gaya hidup ditambah pengendalian populasi untuk memajukan pembangunan berkelanjutan mutlak diperlukan.</p>   |
| <p><b>Pernyataan kaum modernis :</b><br/>Semakin bertambahnya manusia dan meningkatnya pendapatan menghasilkan masalah dalam jangka pendek. Masalah ini memberikan kesempatan dan mempercepat pencarian solusi. Dalam masyarakat bebas, solusi pada akhirnya ditemukan, meskipun banyak orang gagal sepanjang jalan sebagai imbalan bagi diri mereka. Dalam jangka panjang pembangunan-pembangunan baru memberikan keuntungan daripada jika masalah tersebut muncul<sup>21</sup></p> | <p><b>Pernyataan kaum ekoradikal :</b><br/>Hanya teori politik hijau ekosentris yang menyeluruh yang mampu memberikan sejenis kerangka komprehensif yang kita butuhkan untuk mengantarkan resolusi abadi pada krisis ekologis... masyarakat ekosentris akan menjadi satu masyarakat yang disitu ada badan legislatif negara demokratis (yang merupakan bagian dari struktur pembuatan keputusan multilevel yang membuatnya kurang kuat dibanding negara bangsa yang eksis dan lebih responsif terhadap keputusan politik dari badan-badan pembuat keputusan lokal, regional dan internasional yang demokratis); penyebaran kekuatan politik dan ekonomi yang semakin besar baik dalam maupun antara komunitas; jangkauan kontrol makro yang jauh lebih ekstensif pada aktivitas pasar; dan berkembangnya budaya emansipatoris ekosentris<sup>22</sup></p> |

<sup>21</sup> N Myers, and Simon, J.L, *Scarcity or Abundance? A debate on Environmen*, Norton, New York, 1994, hal.65

<sup>22</sup> Robyn Eckersley, *Environmentalism and Political Theory ; Towards an Ecosentric Approach*, UCL Press, London, 1992, hal.185

